

HJALMAR SCHACHT, SANG DIKTATOR PEREKONOMIAN JERMAN
(Sebuah Tinjauan Historis)

Oleh:

Daniel Ramadhan, Wawan Darmawan, Achmad Iriyadi¹

ABSTRAK

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai peranan Hjalmar Schacht dalam membangun perekonomian Jerman tahun 1933-1939. Permasalahan utama yang dikaji dalam artikel ini yaitu “Bagaimana peranan Hjalmar Schacht dalam membangun perekonomian Jerman pada periode 1933-1939?”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yang terdiri dari empat langkah kegiatan, yakni; heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan kajian penelitian yang telah dilakukan, Hjalmar Schacht memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian Jerman setelah Perang Dunia I. Dalam rangka membangun kembali perekonomian Jerman, Schacht mengeluarkan kebijakan-kebijakan, antara lain; (1) Mengatasi permasalahan pengangguran, (2) Pendanaan industri-industri Jerman, dan (3) Mengatasi kebutuhan bahan baku industri. Namun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini tidak hanya untuk memperbaiki perekonomian Jerman saja, akan tetapi sudah direncanakan untuk mempersenjatai kembali militer Jerman dalam rangka mempersiapkan diri untuk perang yang lebih besar di tahun 1939.

Kata Kunci: Hjalmar Schacht, Diktator Perekonomian Jerman, NAZI

ABSTRACT

This article is the result of the research that discusses about the role of Hjalmar Schacht in building the German economy in 1933-1939. The main problem that is studied in this article is "How was the role of Hjalmar Schacht in order to built the German economy in the period 1933-1939?". The method used in this study is historical method consisting of four steps of activity, there are; heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Based on research studies that have been done, Hjalmar Schacht had a very important role in the development of the German economy after World War I. In order to rebuild the German economy, Schacht issued many policies, among others; (1) Addressing the problems of unemployment, (2) Funding of German industries, and (3) Addressing the needs of industrial raw materials. However, these policies were issued not only to improve the German economy, but it was planned to rearm the German military in preparation for a larger war in 1939.

Keywords: *Hjalmar Schacht, German Economic Dictator, NAZI*

¹ Daniel Ramadhan adalah mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, Wawan Darmawan sebagai Dosen Pembimbing I dan Achmad Iriyadi sebagai Pembimbing II. Peneliti dapat dihubungi di nomor 087824618645, e-mail: dandhan069@gmail.com

PENDAHULUAN

Periode antara Perang Dunia I (PD I) dan Perang Dunia II (PD II) dikenal sebagai sebuah masa yang penting bagi dunia, di mana pada masa ini bermunculan kekuatan-kekuatan baru di Eropa. Pada masa ini, dunia terutama di bagian benua Eropa mengalami krisis ekonomi hebat akibat PD I yang menyebabkan hancurnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembangunan. PD I ini merupakan sebuah peperangan besar yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya sehingga meninggalkan luka yang mendalam dan kerugian yang sangat besar bagi hampir di seluruh negara-negara di Eropa. Kerugian yang sangat besar ini disebabkan karena sebagian besar perang yang berlangsung pada PD I terjadi di Eropa. Selain dari sarana dan prasarana yang hancur, perang ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa serta tergoncangnya moral dan spiritual masyarakat Eropa (Pegg, 1956, hlm. 3). Kerugian yang dialami Eropa menjadi suatu bukti betapa besar dampak dari perpecahan antara kekuatan-kekuatan besar di Eropa terhadap berbagai aspek kehidupan.

Berakhirnya PD I ditandai dengan adanya Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ini merupakan ajang perselisihan di antara negara-negara pemenang perang. Amerika Serikat yang diwakili oleh Presiden Woodrow Wilson berambisi membentuk suatu wadah internasional yang disebut Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Sedangkan Inggris yang diwakili Lloyd George dan Perancis yang diwakili Clemenceau lebih menghendaki penghukuman terhadap Jerman sebagai pemicu terjadinya PD I (Supriatna, 2002, hlm. 67). Bagi pihak yang kalah perang, khususnya Jerman, memandang Perjanjian Versailles merupakan suatu perjanjian yang sangat menyakitkan. Hal ini dikarenakan perjanjian ini adalah perjanjian yang didiktakan oleh negara-negara pemenang perang, bukan hasil perundingan (Siboro, 2012, hlm. 85). Dengan kata lain, Perjanjian Versailles ini merupakan suatu kesempatan bagi pihak Sekutu sebagai pihak pemenang perang, dalam hal ini Inggris dan Perancis untuk menghukum seberat-beratnya penyebab terjadinya PD I yaitu Jerman.

Jerman memasuki periode di antara perang (*interwar*) dengan kondisi yang memalukan. Kondisi memalukan tersebut selain dikarenakan kekalahan militer Jerman dalam PD I juga karena lemahnya pemerintahan dalam menghadapi berbagai krisis setelah perang. Dengan ceroboh, pemerintahan ini mengeluarkan kebijakan yang berujung pada hiperinflasi di awal tahun 1920-an (Persson, 2010, hlm. 188). Pada November 1923 inflasi mencapai puncaknya dengan perbandingan satu US Dollar mampu membeli 4 triliun Mark (Pegg, 1956, hlm. 81).

Belum teratasi sepenuhnya krisis pada tahun 1923 tersebut, muncul krisis ekonomi dunia yang terkenal sebagai 'Depresi Hebat' dan melanda hampir seluruh bangsa di Eropa (kecuali Uni Soviet) dan Amerika Serikat (Siboro, 2012, hlm. 96-97). Depresi Hebat ini terjadi pada 25 Oktober 1929 bertepatan dengan hari Jumat atau dikenal dengan *Black Friday*. Krisis ini pada mulanya melanda bursa saham di New York. Dalam rangka menopang perekonomiannya sendiri, Amerika Serikat merubah kebijakan pinjaman

luar negerinya dan mulai menarik kembali berbagai pinjaman dan hutang terhadap negara-negara lain. Jerman merupakan negara yang merasakan langsung dampak dari krisis ini. Penarikan kembali pinjaman dan hutang luar negeri terjadi di saat Jerman sangat membutuhkan pinjaman baru dalam menghadapi kesulitan perekonomiannya (Treue, 1969, hlm. 77).

Dampak dari krisis ini terhadap Jerman tidak hanya berefek pada aspek ekonomi saja, namun berefek juga terhadap situasi sosial dan politik. Krisis ini membuka jalan bagi *Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei* (NSDAP) atau dikenal dengan nama NAZI yang dipimpin oleh Hitler untuk menguasai Jerman. Partai NAZI memiliki program yang berisi 25 butir, antara lain; meninggalkan Perjanjian Versailles, penyatuan Austria dengan Jerman, pemisahan orang-orang Yahudi dari warga negara Jerman, pembaharuan agraria, larangan spekulasi tanah, dan mengganti toko serba ada (*departement store*) dengan toko-toko pengecer (Siboro, 2012, hlm. 116-117).

Hitler sebagai salah satu pemegang kekuasaan besar di Jerman, menginginkan Jerman bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi akibat krisis yang melanda semenjak PD I berakhir. Gagasan ekonomi Hitler diungkapkan oleh Bell (1986) yang menyatakan bahwa:

Hitler's own economic ideas, as developed in the 1920s, were fairly simple. It was the business of government to ensure for its people the best conditions for their life and development; and one vital condition was a secure food supply (hlm. 140-141).

Berdasarkan keterangan tersebut, gagasan ekonomi Hitler ialah dengan menitikberatkan kepada tanggung jawab Pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kehidupannya dengan satu poin utama yakni menjamin ketersediaan makanan bagi masyarakat.

Dalam membangun kembali perekonomian Jerman yang sempat hancur akibat perang, Hitler menunjuk Hjalmar Schacht (untuk selanjutnya ditulis Schacht) sebagai Menteri Ekonomi untuk mengatasi hal tersebut. Ditunjuknya Schacht sebagai orang yang mengatasi perekonomian Jerman ini menjadi salah satu

ketertarikan bagi peneliti. Selama ini anggapan berhasilnya Jerman dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi yang terjadi pasca PD I karena adanya Hitler sebagai penguasa di Jerman. Padahal menurut Shirer (1973, hlm. 229) menyatakan bahwa “*For the first year Nazi economic policies, which were largely determined by Dr. Schacht – for Hitler was bored with economics, of which he had an almost total ignorance-...*”. Hitler sendiri merupakan seseorang yang kurang peduli terhadap proses perekonomian Jerman dan khalayak umum kurang mengetahui adanya seseorang yang berperan penting dalam dibalik kesuksesan Jerman mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi. Tokoh Schacht merupakan seseorang yang perannya sangat penting dalam perekonomian Jerman semenjak Hitler muncul sebagai penguasa. Selain perannya dalam menanggulangi permasalahan ekonomi yang muncul pasca PD I dan dukungannya terhadap Nazi, kehadiran Schacht juga sangat menentukan kebijakan-kebijakan perekonomian yang akan dilaksanakan di awal-awal kepemimpinan Hitler di

Jerman sebagaimana yang sebelumnya telah diungkapkan oleh Shirer.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Hjalmar Schacht dalam membangun perekonomian Jerman tahun 1933-1939?”. Ditulisnya peranan tokoh Schacht ini diharapkan dapat memberikan suatu wawasan mengenai pentingnya peranan Hjalmar Schacht dalam perkembangan awal perekonomian Jerman sebelum PD II. Hal ini dikarenakan selama ini masih banyak yang berpandangan bahwa kebangkitan perekonomian Jerman hanyalah merupakan hasil kerja dari Hitler semata.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode historis atau metode sejarah sebagai suatu cara dalam menjelaskan fenomena masa lalu yang dibantu dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Ismaun (2005, hlm. 34) menyatakan bahwa “metode historis ialah rekonstruksi imajinatif mengenai gambaran masa lampau

peristiwa-peristiwa sejarah secara kritis dan analitis berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa lampau yang disebut sumber sejarah”. Metode historis ini terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Langkah awal dalam penelitian sejarah adalah menentukan topik penelitian. Dalam menentukan topik penelitian ini, peneliti mencari berbagai informasi baik dari buku-buku, maupun sumber-sumber lainnya. Pencarian informasi dilakukan dengan cara mencari berbagai referensi dari buku-buku mengenai Republik Weimar dari berbagai perpustakaan, artikel-artikel dan *e-book* melalui pencarian di situs internet. Kemudian langkah yang kedua ialah mengusut semua evidensi yang relevan dengan topik penelitian yaitu mengenai peranan Hjalmar Schacht pada tahun 1933-1939. Dalam tahapan pengumpulan sumber ini, peneliti membaginya ke dalam tiga sub bab sesuai dengan pencarian akan sumber-sumber yang relevan tersebut, pertama pencarian di situs internet, pencarian di perpustakaan-perpustakaan, pencarian ke koleksi pribadi.

Langkah selanjutnya yaitu peneliti membuat catatan-catatan penting di mana di dalamnya menyangkut informasi mengenai kajian yang akan dibahas sesuai dengan topik penelitian yang telah dipilih. Peneliti mencatat hal-hal penting mengenai peranan Hjalmar Schacht dan pembangunan ekonomi Jerman 1933-1939. Setelah membuat catatan-catatan penting, peneliti mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan atau disebut juga dengan kritik sumber dengan menganalisis data yang didapat agar diperoleh fakta yang terpercaya. Kemudian peneliti menyusun ataupun mengubungkan fakta-fakta dari sumber-sumber atau evidensi-evidensi dan menyajikannya dalam suatu bentuk penafisan yang utuh, hal ini disebut juga dengan interpretasi. Lalu langkah terakhir peneliti merekonstruksi topik penelitian dari fakta-fakta yang relevan dalam bentuk karya tulis atau disebut juga dengan historiografi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terlibatnya Hjalmar Schacht dalam perekonomian Jerman tidak

lepas dari kondisi Eropa yang hancur akibat terjadinya Perang Dunia I (PD I). Dampak yang disebabkan PD I ini menjadi titik tolak suatu perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Eropa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Siboro (2012, hlm. 85) yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi dan politik negara-negara di Eropa sesudah PD I mempunyai kaitan dengan kondisi negara-negara tersebut yang mengalami kerusakan akibat perang dan perjanjian perdamaian yang mengakhiri perang tersebut.

Kerugian material dan non-material menjadi permasalahan utama yang muncul sejak berakhirnya peperangan. Banyaknya korban jiwa serta sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat Eropa membuat mereka berada dalam kondisi yang terpuruk. Pegg (1956, hlm. 3-4) menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan peperangan itu sangat besar baik kerugian jiwa maupun materi. Korban yang berjatuhan diperkirakan mencapai 12 juta orang. Kerugian materi juga tidak kalah besarnya, kekayaan negara yang telah lama berkembang musnah, hutang-hutang

melambung tinggi, produksi industri dan pertanian menurun drastis, hancurnya sebagian besar wilayah Perancis dan Belgia, investasi luar negeri berkurang secara drastis, serta perdagangan yang hancur berantakan (Pegg, 1956, hlm 3-4). Bagi Jerman, perang tidak hanya menghabiskan seluruh persediaan bahan-bahan baku material, namun juga memaksa para pekerja dan mesin-mesin di seluruh industri Jerman untuk bekerja secara penuh (Treue, 1969, hlm. 75).

Pihak-pihak yang kalah perang mengalami perubahan yang sangat besar, terutama dalam hal ini negara Jerman. Jerman berubah dari negara yang berbentuk kekaisaran menjadi Republik dikarenakan negara-negara pemenang perang, dalam hal ini Presiden Woodrow Wilson hanya bersedia menanggapi permohonan damai dari pemerintahan demokratik Jerman sebab dia ingin diyakinkan bahwa dia sedang berhadapan dengan seluruh rakyat Jerman, bukan hanya dengan penguasanya saja. Kehancuran tentara Jerman memaksa *Kaiser* Wilhelm II turun tahta (9 November 1918). Mayoritas cabang-cabang Partai Sosial Demokratik (*Social Democratic Party*)

memproklamasikan berdirinya Republik, dan dua hari kemudian (11 November 1918) Pemerintah republik yang dipimpin oleh golongan sosialis ini menandatangani gencatan senjata dengan sekutu dan mengakui kekalahannya (Siboro, 2012, hlm. 68). Perubahan politik terutama terjadi di Jerman dengan adanya ultimatum bagi kekaisaran Jerman untuk merubah konstitusi negara menjadi negara demokrasi. Hal ini ditandai dengan turunnya Kaisar Wilhelm II dari tahtanya. Perubahan konstitusi ini dilakukan agar terjadi kesepakatan damai antara pihak sekutu dan Jerman dalam mengakhiri peperangan di antara mereka dan membentuk suatu perjanjian perdamaian.

Disetujuinya Perjanjian Versailles menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Jerman. Salah satu kelompok masyarakat yang menentang keras perjanjian ini adalah *Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei* (NSDAP) atau yang lebih dikenal dengan partai Nazi. Partai Nazi ini pada mulanya adalah Partai Buruh yang telah ada sebelum Adolf Hitler mempopulerkannya dengan menonjolkan nasional-sosialisme. Partai ini kemudian

menjadi terkenal berkat kemampuan demagogi Hitler serta penonjolan cara kepemimpinan serta disiplin yang tegas dan kuat (Marbun, 1983, hlm. 44). Keberhasilan Hitler merupakan satu pertanda bagi kehancuran Republik Weimar. Dilihat dari hasil statistik ternyata para pendukung Hitler tidak terbatas lagi pada kaum pengangguran dan kaum miskin, tetapi juga mendapat dukungan moral dan material dari para pemilik industri besar Jerman. Bantuan juga datang dari para perwira tua yang memimpikan kebesaran Jerman.

Selain faktor-faktor di atas, keberhasilan Hitler juga dikarenakan lawan-lawan politiknya tidak atau kurang berdisiplin sebagai sebuah organisasi. Disiplin partai yang longgar menambah kecurigaan rakyat kepada partai dan akhirnya membenci partai dan paham liberalisasi dan demokrasi (Marbun, 1983, hlm. 47). Proses konsolidasi yang ditempuh oleh Hitler dalam mencapai kekuasaan terdiri atas tiga fase; (1) Merebut sepenuhnya seluruh kekuasaan yang sah, (2) Menghancurkan kelompok-kelompok politik lain, dan (3) melakukan pembersihan terhadap

saingan-saingannya di dalam partai Nazi sendiri (Siboro, 2012, hlm. 126).

Selain dampak terhadap situasi politik Jerman, perjanjian perdamaian antara pihak pemenang dan yang kalah perang tersebut berdampak juga terhadap perekonomian Jerman. Berdasarkan Perjanjian Versailles tersebut, Jerman bertanggung jawab penuh atas terjadinya PD I dan harus membayar kerugian perang terhadap negara-negara yang terlibat perang di dalamnya. Secara umum, dalam perjanjian ini Jerman harus mengganti rugi segala kerugian terhadap warga sipil dan barang-barang milik mereka yang disebabkan agresi Jerman baik melalui darat, laut dan udara (Pegg, 1956, hlm. 24-25). Periode diantara tahun 1920 dan 1924 dikenal juga sebagai periode inflasi, yang merupakan masa-masa tersulit yang dialami Jerman selama masa damai. Jatuhnya nilai mata uang pada masa ini dapat berdampak juga pada jatuhnya nilai barang-barang, melebarnya jurang pemisah antara kelas atas dan kelas menengah ke bawah, korupsi di dalam pemerintahan, kurangnya makanan-makanan bergizi, dan keragu-raguan atas kekayaan seseorang (Schacht, 1967, hlm. 62).

Jatuhnya Wall Street (Pasar Bursa New York) dalam bulan Oktober 1929 (sebagai akibat dari spekulasi keuangan yang benar-benar tidak diatur) menyebabkan hilangnya banyak uang. Bank-bank Amerika Serikat memberikan banyak pinjaman kepada nasabah yang kemudian menginvestasikan uang tersebut dalam pasar bursa. Ketika harga di pasar bursa jatuh, para peminjam tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya. Konsekuensinya, di Amerika Serikat terjadi penyusutan yang amat besar dalam berbagai jenis kredit, dan banyak juga bank yang pailit. Kemudian, amat sedikit modal Amerika Serikat yang tersedia untuk investasi Eropa. Lebih jauh, pinjaman-pinjaman yang telah diberikan kepada negara-negara di Eropa tidak dapat diperbaharui, karena Amerika Serikat sendiri membutuhkan modal tersebut untuk menutupi kekurangan di dalam negerinya (Siboro, 2012, 99-100). Krisis ini semakin memperburuk keadaan perekonomian Jerman di mana Pemerintah sedang membutuhkan pinjaman kembali modal pada Amerika Serikat (Treue, 1969, hlm. 77).

Naiknya Hitler menjadi penguasa di Jerman berdampak pada perubahan dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek politik dan ekonomi. Untuk mendukung cita-cita politiknya, tentu saja ekonomi dalam negeri Jerman harus dibenahi terlebih dahulu. Usaha Hitler untuk mendanai perkembangan militer Jerman berujung pada diangkatnya kembali Schacht sebagai Presiden *Reichsbank*. Selain dalam rangka memenuhi keinginan Hitler untuk mendanai persenjataan kembali Jerman, Schacht juga dipercaya untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang muncul sebagaimana yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya bahwa permasalahan ekonomi Jerman selepas berakhirnya PD I berada pada kondisi yang terpuruk. Hitler mempercayakan kepada Schacht untuk memenuhi kebutuhan militer Jerman meskipun Jerman sedang berada dalam kondisi depresi ekonomi. Hitler memberi keleluasaan kepada Schacht untuk memanfaatkan segala aspek industri, perdagangan, dan keuangan Jerman untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan militer Jerman (Jackson, 1946, hlm. 742).

Pada tanggal 30 Juli 1934, Schacht resmi menggantikan Schmitt sebagai Menteri Ekonomi. selain itu ia juga menjabat sebagai Presiden *Reichsbank* dan juga *Generalbevollmächtigte für die Kriegswirtschaft* atau Penanggung Jawab Umum Ekonomi Perang (Preparata, 2005, hlm. 216). Dasar pemikiran Schacht dalam mengatasi perbaikan ekonomi Jerman ini dipengaruhi besar oleh teori ekonomi Keynes. Keterhubungan perbaikan ekonomi Jerman dan Keynes ini diungkapkan oleh Giatrakis (2012, hlm. 259) yang menyatakan bahwa secara historis, pemikiran Schacht dipengaruhi oleh dua pilar utama teori Keynes mengenai permasalahan reparasi dan permasalahan pengangguran. Lebih lanjut Grein II (2012, hlm. 30-31) menyatakan bahwa dalam mengatasi permasalahan ekonomi, peranan Pemerintah sangat diperlukan, terutama dalam mengeluarkan kebijakan anggaran defisit. Kebijakan anggaran defisit ini ditujukan untuk membuka lapangan pekerjaan dan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Lebih lanjut Grein II menyatakan bahwa Schacht juga terpengaruhi

kebijakan *New Deal* yang diusung oleh Roosevelt dan konsepsi dalam membangun suatu negara melalui proyek konstruksi massa dan pekerjaan publik. Maka, dengan dijalankannya anggaran defisit ini bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan dapat mengatasi permasalahan reparasi dan pengangguran pasca krisis ekonomi yang melanda sejak berakhirnya PD I.

Pengaruh dari kebijakan *New Deal* terhadap Schacht ini terlihat dari kesamaan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam mengatasi depresi ekonomi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Garraty (1973, hlm 942-943) yang menyatakan bahwa dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang muncul, Nazi dan para pengusung kebijakan *New Deal* menerapkan suatu siasat yang sangat intensif dengan mendahului kesejahteraan perekonomian masyarakat mereka daripada menunggu perekonomian dunia kembali stabil dan memiliki pandangan yang optimis terhadap apa yang mampu dilakukan oleh Pemerintah. Kedua negara sangat membatasi kebebasan individu dalam meraih keuntungan ekonomis. Di samping itu, Nazi dan para pengusung

kebijakan *New Deal* bersikeras bahwa perbaikan ekonomi tidak dapat dilakukan tanpa adanya usaha dalam menata kembali struktur sosial, lebih jauh tanpa menimbulkan suatu konflik antar kelas. Untuk menghindari konflik ini, kedua negara tersebut mengatur sedemikian rupa agar tercapai tujuan ekonomi dan sosialnya demi mencapai sasaran politiknya.

Salah satu kebijakan Schacht dalam membangun kembali perekonomian Jerman ialah dengan mengurangi tingginya tingkat pengangguran. Sebagaimana yang diungkapkan Spannaus (2005, hlm. 13) yang menyatakan bahwa "*The first phase of Schacht's program for Hitler consisted of public works slave-labor, an alleged response to the massive unemployment which had ravaged the German population,*". Tingginya angka pengangguran ini tidak lain merupakan dampak dari krisis ekonomi pada tahun 1930-an yang melanda dunia. Terjadinya peristiwa *Wall Street Crash* pada tahun 1929, membuat Amerika Serikat menarik kembali investasi dan hutang-hutang luar negeri yang telah dikeluarkannya, terutama kepada Eropa. Ketergantungan perekonomian

Jerman terhadap investasi asing dari Amerika Serikat membuat Jerman menjadi salah satu negara yang terkena dampak terparah dari krisis ini. Jerman dan negara-negara lainnya mulai terkena dampak dari krisis ini, salah satunya antara lain angka pengangguran yang melonjak tinggi (Grein II, 2012, hlm. 30). Krisis ini semakin memperburuk kelangsungan perekonomian Jerman yang belum pulih dari krisis ekonomi yang dialaminya selepas perang berakhir.

Di bulan Maret tahun 1932, angka pengangguran di Jerman mencapai puncaknya. Berdasarkan statistik, terdapat lebih dari 6 juta orang pengangguran. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan diperkirakan angka pengangguran melebihi data statistik itu, termasuk mereka yang kesulitan dalam mencari tempat tinggal, dan diperkirakan 8,75 juta orang merupakan pengangguran. Hal ini dapat berarti 1 dari 4 orang masyarakat Jerman dapat kehilangan pekerjaannya (Preparata, 2002, hlm. 17).

Pada bulan September 1933, telah dimulai suatu program untuk membangun *Autobahnen* atau jalan raya. Pembangunan jalan raya ini

sekaligus menjadi suatu kebutuhan militer, dengan pengeluaran 3 milyar Mark antara tahun 1933 dan 1938. Pada mulanya hanya 3 juta Mark yang dikeluarkan pada tahun 1933, namun pada tahun 1938 anggaran tahunan untuk program ini meningkat hingga 916 juta Mark. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap tumbuhnya perekonomian dari krisis ekonomi sebelumnya, bangkitnya optimisme bisnis, dan rendahnya tingkat rata-rata upah yang diperoleh dapat dipertimbangkan sebagai usaha dalam mengurangi jumlah pengangguran. Di penghujung tahun hanya terdapat 4 juta orang pengangguran yang tersisa jika dibandingkan dengan bulan Januari di tahun yang sama (Holborn, 1969, hlm. 750-751).

Berkurangnya angka pengangguran secara keseluruhan diungkapkan Robson (1940, hlm. 18) yang menyatakan bahwa pekerja yang menganggur di awal tahun 1933 mencapai 6 juta orang berkurang menjadi 4,8 juta orang pada bulan Juni 1933 kemudian pada bulan Oktober di tahun yang sama berkurang menjadi 3,7 juta orang penganggur. Dalam perkembangannya angka

pengangguran ini semakin berkurang hingga mencapai angka 2,268 juta orang di tahun 1934, 2,150 juta orang di tahun 1935, 1,076 juta orang di bulan oktober 1936, dan 502 ribu orang pada tahun 1937. Semenjak itu terjadi kekurangan tenaga kerja secara terus menerus di Jerman. permasalahan pengangguran dapat teratasi.

Di masa kepemimpinan Nazi, segala macam permasalahan buruh diatur sedemikian rupa, sebagaimana diungkapkan Robson (1940) yang menyatakan bahwa

On 2 May the Nazis seized all trade unions buildings, arrested all the union leaders, and confiscated the trade union property, in the following month the Social Democratic party was suppressed and the few remaining leaders taken into custody. from that moment the German labour movement was liquidated. It has been truly said that Germany no longer has any working class organization in the accepted meaning of the term (hlm. 9).

Semenjak Nazi berkuasa, para buruh di Jerman tidak lagi memiliki kebebasan untuk berserikat di dalam suatu organisasi kelas pekerja. Segala macam yang berhubungan dengan organisasi buruh diambil alih dan disita oleh Pemerintah, bahkan para

pemimpinnya pun ditangkap. Hal ini juga diungkapkan oleh Chambers (1962, hlm. 562) memaparkan bahwa “*The trade unions were destroyed and expropriated, and a new Labor Front under Ley provided for the workers welfare, insurance, savings, and a certain amount of occupational training*”. Seluruh serikat buruh yang ada dihapuskan dan diambil alih oleh Pemerintah. Sebagai penggantinya, dibentuk lah serikat kerja baru yang disebut dengan *Labor Front* atau Front Buruh yang mengatur kesejahteraan para buruh, asuransi, tabungan, dan beberapa macam pelatihan kerja. Selain *Labour Front* atau dikenal juga dengan *German Labour Front* (DAF), Nazi juga membentuk organisasi-organisasi serupa yang bertujuan untuk mengendalikan para pekerja atau buruh di Jerman di bawah organisasi DAF. Organisasi-organisasi tersebut antara lain *Schönheit der Arbeit* (*Beauty of Labour*) dan *Kraft durch Freude* (KdF). Organisasi-organisasi ini mengatur secara menyeluruh jam kerja juga rekreasi, serta eksploitasi terhadap para pekerja atau buruh (Lee, 2008, hlm. 178-179).

Kebijakan Schacht selanjutnya dalam memperbaiki perekonomian

Jerman ialah dengan mendanai industri-industri Jerman. Usaha Schacht dalam memperoleh dana yang sebanyak-banyaknya dari sumber mana pun mendorong ia untuk menggunakan aset asing yang dibekukan di *Reichsbank*. Sebagaimana yang diungkapkan Jackson (1946, hlm. 742-743) yang menyatakan bahwa dalam memorandumnya kepada Hitler ia berkata bahwa *Reichsbank* memiliki banyak simpanan yang dimiliki oleh para investor asing. Simpanan ini dengan mudah dapat digunakan dalam rangka pembiayaan persenjataan kembali Jerman. Dana yang digunakan dalam persenjataan kembali Jerman ini separuhnya dibiayai dari aset-aset yang dimiliki oleh lawan-lawan politik Hitler. Lebih lanjut dipaparkan oleh Preparata (2005, hlm. 226) bahwa Amerika Serikat telah menanamkan modalnya di Jerman hingga mencapai jumlah 475 juta Dollar.

Selain menggunakan aset asing, dana juga diperoleh dari pajak dan hutang negara. Hutang negara yang dilakukan ini digunakan untuk perkembangan industri perang Nazi. Selama periode dari tanggal 31 Desember 1932 hingga 30 Juni 1938,

hutang negara meningkat dari 10,4 milyar Mark menjadi 19 milyar Mark. Meningkatnya hutang negara ini hanya didedikasikan untuk persenjataan kembali Jerman dan *Four-Year Plan* (Jackson, 1946, hlm. 744). Sebagaimana yang diungkapkan Preparata (2005, hlm. 223-224) yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Desember 1934, Jerman mendapatkan suntikan dana sebesar 4 juta Dollar dari Montagu Norman, seorang ahli keuangan dari Inggris. Dana ini dapat diperoleh karena Jerman dan Inggris pada tahun 1934, ketika Schacht naik menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atas perekonomian Jerman, mengadakan suatu kesepakatan dengan Inggris. Dengan adanya kesepakatan ini, Jerman dapat memperoleh komoditas yang dibutuhkan dalam keperluan persenjataan kembali dari Inggris, seperti; karet dan tembaga.

Pada bulan Agustus 1933, Schacht bertemu dengan para pemimpin industri baja Jerman, diantaranya ada perusahaan raksasa Krupp dan Siemens. Bersama-sama, mereka mendirikan *Metallforschungsgesellschaft* (Perusahaan Riset Industri Baja)

disingkat dengan nama MEFO. MEFO ini merupakan suatu perusahaan fiktif dengan sumbangan modal yang sangat kecil (250,000 Mark). Rekening yang dikeluarkan dengan nama MEFO ini berlangsung dari tahun 1934 sampai 1938, rekening senilai 12 milyar *Reichsmark* telah dikeluarkan untuk komisi utama perang. *MEFO-Bills* ini merupakan titik utama dari proses persenjataan kembali militer Jerman. Meskipun pada akhirnya hanya 20% biaya yang dikeluarkan untuk anggaran belanja persenjataan kembali militer, pendapatan yang diperoleh dari MEFO ini mampu menutupi hingga 50% pengeluaran di tahun-tahun berikutnya. (Preparata, 2005, hlm. 220). Perusahaan ini hanyalah suatu organisasi rekayasa yang hanya bermodalkan satu juta *Reichsmarks*. Rekening ini berlaku selama 6 bulan namun dengan ketentuan dapat diperpanjang tiap 3 bulan. Rekening MEFO dapat dipergunakan di bank Jerman di mana pun dan kapan pun, dan bank-bank tersebut pada gilirannya menjual kembali rekening tersebut ke *Reichsbank* kapan pun selama tiga bulan setelah rekening ini digunakan. Jumlah hutang dalam rekening ini menjadi suatu rahasia

yang dijaga ketat negara (Jackson, 1946, hlm. 743).

Rekening MEFO ini merupakan suatu rekening yang diciptakan oleh *Reichsbank* dan dijamin oleh negara dalam membiayai kebutuhan persenjataan Jerman. Rekening ini diterima di semua bank Jerman dan hanya dikeluarkan oleh *Reichsbank*. Pembiayaan persenjataan Jerman oleh rekening ini tetap dapat dirahasiakan dikarenakan rekening ini tidak dipublikasikan oleh bank negara maupun anggaran negara (Shirer, 1973, hlm. 230). Rekening MEFO berfungsi seperti kredit jangka pendek, namun berbeda dapat diperpanjang hingga lima tahun. Jika di suatu waktu pasar uang telah pulih kembali, rekening MEFO ini mendapatkan 4 persen bunga yang menjadi salah satu daya tarik untuk berinvestasi seperti yang diharapkan Schacht (Carr, 1973, hlm. 24). Sistem rekening ini berlangsung hingga 1 April 1938, ketika jumlah hutang mencapai 12 triliun *Reichsmarks*. Metode keuangan ini mampu memberikan kredit kepada Pemerintah hingga 100 juta *Reichsmarks* melalui *Reichsbank*. Schacht mengakui bahwa dengan menggunakan nama Pemerintah,

rekening MEFO ini membuat *Reichsbank* mampu meminjamkan uang yang biasanya tidak dapat dilakukan sebelumnya (Jackson, 1946, hlm. 743).

Kebijakan Schacht dalam memanfaatkan para pekerja dan buruh beserta sarana dan prasarana tentu saja memiliki keterbatasan. Dengan adanya hal ini, tentu saja Jerman membutuhkan sumber-sumber bahan mentah dari negara-negara lain. Cara yang digunakan oleh Hitler dengan menggunakan dalam memperoleh sumber-sumber bahan mentah, mengambil alih para pekerja dari Eropa Timur untuk dijadikan pekerja industri Jerman, memperoleh pabrik-pabrik beserta bahan-bahan bakunya, dan menyiapkan kamp atau pangkalan bagi para tahanan untuk dipekerjakan hingga mati bukanlah merupakan gagasan dari Schacht. Meski pun demikian, hal-hal tersebut merupakan aturan dari sistem ekonomi yang berlaku (Spannaus, 2005, hlm. 14).

Demi memenuhi kebutuhan militer akan bahan-bahan baku industri perang, Schacht mengeluarkan suatu kebijakan baru. Pertama ia mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan permanen

pembayaran hutang untuk menghentikan mengalirnya komoditi perdagangan yang berharga sebagai pengganti hutang. Kedua, ia mengenalkan kebijakan *New Plan* yang memperluas dan memperkuat kontrol negara terhadap perdagangan luar negeri dan impor (Carr, 1973, 39). Kebutuhan akan barang-barang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri sangat dibutuhkan oleh Jerman. Hal ini dikarenakan dari 34 barang-barang yang dibutuhkan oleh Jerman, hanya terdapat dua jenis barang yang dapat diproduksi hingga memenuhi kebutuhan Jerman, sebagaimana yang diungkapkan Preparata (2005) yang memaparkan bahwa:

Of the 34 vital materials without which a nation cannot live, Germany had only two in ample quantities – potash and coal. For the rest it would have to rely on its chemists and international friends (hlm. 223).

Dengan kata lain, kurangnya produksi jenis barang yang diperlukan oleh Jerman membuat Jerman memanfaatkan perdagangan dengan negara-negara lain untuk memperoleh jenis barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh Jerman.

Di dalam kebijakan *New Plan* ini terdapat tiga fitur utama yang

direncanakan Schacht, antara lain; (1) Larangan terhadap perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan tujuan program pengembangan militer Jerman, (2) Ditingkatkannya persediaan barang-barang impor yang esensial atau dibutuhkan di dalam perdagangan luar negeri, (3) Dihapuskannya perjanjian-perjanjian yang dapat mengganggu hubungan antar negara di dalam perdagangan luar negeri. Di bawah kebijakan *New Plan*, transaksi ekonomi antara Jerman dan negara-negara lainnya tidak lagi diatur oleh mekanisme harga, namun ditentukan oleh banyaknya agensi Pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi militer Jerman (Jackson, 1946, hlm. 744-745).

Salah satu dampak dari kebijakan Schacht ini adalah pergerakan yang signifikan untuk menghindari perdagangan dengan Eropa Barat dan Amerika Serikat menuju negara-negara Balkan dan Amerika Latin. Hal ini menggambarkan perubahan yang terjadi di Jerman di mana barang-barang impor ditolak secara drastis dan impor makanan serta bahan-bahan mentah meningkat. Negara-negara di

Amerika Latin dan Balkan menjadi perhatian Jerman dikarenakan kedua area ini memiliki keuntungan yang besar dari produk utamanya yang tidak bisa diterima oleh pasar dunia. Kedua, area-area yang masih terbelakang ini akan menerima barang-barang Jerman di mana barang-barang ini tidak diterima di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Ketiga, di dalam kasus Balkan ini menjadi suatu politik dan strategi untuk berdagang dengan negara-negara tetangga yang akan bergantung pada perekonomian Jerman. Untuk mencapai kesepakatan dengan negara-negara Balkan, Schacht membuat suatu penawaran yang kurang menguntungkan bagi Jerman, dikarenakan negara-negara tersebut tidak mudah menemukan pasar yang dapat menerima hasil produksinya. Sebagai gantinya, Jerman menawarkan mereka mesin-mesin daripada barang-barang kebutuhan konsumen yang sedikit cadangannya di Jerman sebagai hasil dari kebijakan Nazi (Carr, 1973, hlm. 40). Perjanjian-perjanjian yang dilakukan untuk memastikan pembayarannya dapat menggunakan mata uang *Mark* baik barang-barang impor dan ekspor. Nilai tukar harus ditentukan di tiap-tiap

transaksi yang besar. Sistem yang digunakan ini menghapuskan sistem-sistem perjanjian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sekitar 65 persen dari perdagangan luar negeri yang dilakukan Jerman menggunakan sistem ini. Schacht melibatkan lebih dari 25 negara ke dalam perjanjian bilateral ini, antara lain negara-negara di Amerika Latin, Balkan, Yunani, Turki, Eropa Timur seperti, Rumania, Bulgaria, Hungaria (Preparata, 2005, hlm. 223). Dengan demikian, Jerman juga mendapatkan keuntungan politik dengan dijalankannya kebijakan *New Plan* tersebut. Negara-negara Balkan dan Amerika Latin sangat bergantung kepada Jerman dalam mendistribusikan barang-barang hasil produksinya. Selain itu, negara-negara tersebut juga sangat bergantung kepada Jerman dalam mengembangkan industrinya yang masih terbelakang dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

SIMPULAN

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Hjalmar Schacht tidak semata-mata hanya untuk memperbaiki perekonomian saja, namun telah direncanakan sebelumnya

bahwa aspek perekonomian juga harus dibangun beriringan dengan perkembangan politik dan militer Jerman. Dampak yang dihasilkan terhadap perekonomian Jerman ialah teratasinya masalah pengangguran yang pada mulanya mencapai 6 juta orang pada tahun 1933 menjadi 500 ribu orang pada tahun 1937, kemudian penggunaan rekening MEFO dalam mendanai keperluan perang hingga mencapai 12 milyar *Mark*, serta diterapkannya kebijakan *The New Plan* yang mengubah sistem perdagangan antar negara menjadi sistem bilateral dalam rangka memenuhi kebutuhan makanan dan bahan-bahan baku keperluan perang. Di samping itu, kebijakan-kebijakan Schacht juga berdampak pada aspek sosial di mana terbagi atas kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri dari, kelompok pekerja industri atau buruh, pedesaan, pengusaha, dan wanita. Dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut tidak seluruhnya dapat menikmati keuntungan yang diperoleh dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan Schacht.

Dampak selanjutnya ialah dampak regional, yang berpengaruh terhadap hubungan Jerman dengan

negara-negara di Eropa Timur, Balkan dan Amerika Latin. Dengan diterapkannya *The New Plan* pada tahun 1934, perdagangan internasional yang dilakukan Jerman beralih ke negara-negara yang perkembangan industrinya lebih lambat daripada negara-negara Eropa lainnya, seperti negara-negara di Eropa Timur, Balkan, dan Amerika Latin. Selain dampak terhadap ekonomi, sosial, dan regional, kebijakan-kebijakan Schacht juga tentu saja berpengaruh terhadap perkembangan politik dan militer Jerman. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Schacht ini lebih kepada meletakkan pondasi dasar bagi Jerman dalam mengembangkan militer Jerman yang sempat disusutkan dalam Perjanjian Versailles.

Dalam perkembangan selanjutnya Hitler lebih menginginkan persiapan perang Jerman dipercepat dan mengganti Schacht dengan Hermann Goering sebagai Menteri Ekonomi Jerman dan memulai *Four-Year Plan* kedua untuk mengarahkan perekonomian Jerman menjadi ekonomi perang total. Dengan adanya peletakan pondasi perekonomian Jerman menuju persiapan perang, hal

ini juga berdampak pada politik Jerman di mana Hitler pada tahun 1937 mengumumkan untuk menolak memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Versailles. Hitler selanjutnya membangun aliansi dengan negara-negara fasis lainnya, dan memulai pendudukan terhadap wilayah Polandia pada tahun 1939 yang menandai dimulainya PD II.

DAFTAR PUSTAKA

- Bell, P. M. H. (1986). *The Origins of The Second World War in Europe*. New York: Longman Inc.
- Carr, W. (1973). *Arms, Autarky, and Aggression; A Study in German Foreign Policy, 1933-1939*. New York: Norton & Company, Inc.
- Chambers, F. P. (1962). *This Age of Conflict; The Western World - 1914 to the Present*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc.
- Grein II, A. W. (2012). *The Third Reich's Macroeconomic Policies: Enablers of Genocide*. (Tesis). Columbus State of University, Georgia.
- Holborn, H. (1969). *A History of Modern Germany, 1840-1945 Volume 3*. New York: Alfred A Knoop Inc.
- Ismaun. (2005). *Sejarah sebagai Ilmu*. Bandung: UPI.
- Jackson, R. H. (1946). *Nazi Conspiracy and Aggression Volume II*. Washington: United States Government Printing Office.
- Lee, S. J. (2008). *The European Dictatorship 1918-1945*. New York: Routledge.
- Marbun, B. N. (1983). *Demokrasi Jerman; Perkembangan dan Masalahnya*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Pegg, C. H. (1956). *Contemporary Europe in World Focus*. New York: Henry Holt and Company.
- Persson, K. G. (2010). *An Economic History of Europe; Knowledge, Institutions and Growth, 600 to the Present*. New York: Cambridge University Press.
- Preparata, G. G. (2002). Hitler's Money: The Bills of Exchange of Schacht and Rearmament In The Third Reich. *American Review of Political Economy*, 1 (1). hlm. 15-27.
- Preparata, G. G. (2005). *Conjuring Hitler; How Britain and Amerika made the Third Reich*. London: Pluto Press.
- Robson, W. A. (1940). *Labour Under Nazi Rule*. London: Oxford University Press.
- Schacht. (1967). *The Magic of Money*. London: Oldbourne Book Co. Ltd.
- Shirer, W. L. (1973). *The Rise and Fall of the Third Reich*. London: Pan Books Ltd
- Siboro, J. (2012). *Sejara Eropa; dari Masa Menjelang Perang*

- Dunia I sampai Masa Antarbelleum.* Yogyakarta: Ombak.
- Spannaus, N. (2005). Hjalmar Horace Greeley Schacht; Adolf Hitler's 'Respectable' Banker. *Executive Intelligence Review*, 32 (8), hlm. 12-14.
- Supriatna, N. (2002). *Ideologi dan Masyarakat: Kajian Sejarah Eropa Abad ke-20.* Bandung: Historia Press.
- Treue, W. (1969). *Germany Since 1848: History of the Present Times.* Bremen: Carl Schünemann Bremen.